

## KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

*Aynun Nurul Ulufah*

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: [aynunnurul@unida.gontor.ac.id](mailto:aynunnurul@unida.gontor.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this writing is to describe the Indonesian government's policies in improving the quality of education in Indonesia. The problem of government policy is improving the quality of Islamic education in Indonesia, which is a strategic issue in the development implementation agenda. Educators in schools have a strategic position in the development of students. Because of the task of education, apart from the government, educators also have the obligation to participate in making the nation's life more intelligent. The method the author uses in writing this article is a literature review. The conclusions that can be obtained are, First; facilities and infrastructure as well as educators as one of the most important components of the Indonesian government's policy strategy in the national education system which receives primary attention. Second: The quality of service regarding facilities and infrastructure as well as educators must continue to be improved. Third: the welfare of educators from a material perspective must also receive serious attention.*

### ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Masalah kebijakan pemerintah meningkatkan Kualitas pendidikan Islam di Indonesia yang merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pembangunan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, pendidik juga memiliki kewajiban turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian pustaka. Hasil kesimpulan yang bisa diperoleh yaitu, *Pertama*; sarana dan prasarana serta pendidik sebagai salah satu komponen strategi kebijakan pemerintah Indonesia yang terpenting dalam sistem pendidikan nasional yang mendapat perhatian utama, *Kedua*: Kualitas mutu pelayanan menyangkut sarana dan prasarana serta pendidik harus terus ditingkatkan. *Ketiga*: kesejahteraan pendidik dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius.

**Keywords:** Kebijakan Pemerintah; Peningkatan Kualitas; Pendidikan Islam

### PENDAHULUAN

Potret pembangunan pendidikan di Indonesia merupakan realitas yang selalu berkembang sebagai upaya merespon situasi dan zaman terus menerus berubah, dan perkembangan pemikiran manusia. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah harus menyadari bahwasannya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Taufiqurokhman, *Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia*. 2022. 2

<sup>2</sup> Sabar Budi Raharjo. Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 298–319. Retrieved from <http://perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/1129-4239-1-PB>. 2012. 14

Namun dalam kebijakan pendidikan, terutama dalam pola perumusan kebijakan pendidikan masih berpusat pada elite kekuasaan dengan sistem *top-down* pada satu sisi, sedangkan partisipasi masyarakat relatif masih minimal. Pada sisi lain, meskipun saat ini kita sudah memasuki era otonomi daerah, praktik dengan kulltur birokrasi politik lama masih tetap mengemuka.

Banyak rumusan kebijakan pendidikan yang dirancang secara rumit, tetapi pada tataran implementasi mengalami banyak penyimpangan. Penyimpangan ini masih sering terjadi di lapangan. Selain itu, berbagai paket kebijakan tentang inovasi pendidikan hampir selalu dilakukan dengan serba cepat atau instan dan kurang mempertimbangkan berbagai implikasi secara matang.<sup>3</sup>

Dari berbagai kondisi tersebut proses yang serba cepat dalam setiap perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan secara akumulatif telah mendorong munculnya pandangan skeptik di masyarakat. Salah satunya adalah keluhan di lapangan bahwa sering terjadi perubahan kebijakan pendidikan belum mampu menghasilkan perbaikan secara signifikan, keluhan yang sering muncul adalah ganti menteri ganti kebijakan.

Kondisi itu menunjukkan bahwa banyak tindakan pembangunan pendidikan yang di ambil dan dilakukan sebelum tindakan pembangunan yang sebenarnya, dan masih berupa tindakan membangun serta tindakan membangun hanya bersifat nominal. Hal ini disebabkan belum adanya sikap dasar pembangunan yang benar di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang mengarah pada perbaikan pendidikan masih mendasarkan pada fondasi ideologis yang rapuh atau tidak jelas dasar ideologisnya.<sup>4</sup> Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan untuk satuan pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar (MI dan MTs) hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah),<sup>5</sup>

Dengan mencermati uraian di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah baagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan islam di Indonesia.

## METODE

Penulis menggunakan metode penelitian library research atau studi pustaka dalam menyusun artikel ini. Penulis memilih library research ini karena dapat memberikan gambaran tentang ruang lingkup komponen kepemimpinan transformatif dalam lembaga pendidikan dengan melalui analisis dan sintesis literatur yang relevan. Metode library research yang dilakukan dengan cara mencari literature yang berbasis data akademik, jurnal ilmiah, serta pada artikel yang berkaitan dengan topik ruang lingkup komponen kepemimpinan transformatif dalam lembaga pendidikan. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai seperti "komponen kepemimpinan transformatif, "lembaga pendidikan Islam". Setelah mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, peneliti melakukan analisis literatur secara cermat.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis untuk memahami ruang lingkup komponen kepemimpinan transformatif dalam lembaga pendidikan. Data dan temuan dari literatur yang telah diolah kemudian digunakan untuk menyusun pandangan menyeluruh tentang ruang lingkup komponen kepemimpinan transformatif dalam lembaga pendidikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif. Melalui metode penelitian library research, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam

<sup>3</sup> Rusdiana. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung Pustaka Setia. 2015. 17

<sup>4</sup> Ibid Rusdiana 2015

<sup>5</sup> Malik, O. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016. 29

memahami ruang lingkup komponen kepemimpinan transformatif dan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya guna melakukan perubahan untuk lembaga pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman.

## LANDASAN LITERATUR

### Aspek Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan untuk satuan pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar (MI dan MTs) hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat aspek itu yakni: (1) kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Kebijakan hal terpenting, utamanya yang berlaku secara nasional meliputi kurikulum dan ujian nasional. Hal itu termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru; (2) kepemimpinan (*leadership*) kepala sekolah juga tak kalah penting di dalam manajemen berbasis sekolah; (3) infrastruktur, yang tidak lain adalah sarana dan prasarana terkait dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu semua kata Supriano, berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. "Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Siswa bisa belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial; (4) proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas lanjut Supriano, dapat mendorong anak-anak terbangun motivasinya. Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru,<sup>6</sup>

Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21.<sup>7</sup> Empat kompetensi yang biasa disingkat 4C tersebut meliputi *Critical Thinking* (berpikir kritis), *Collaboration* (kemampuan bekerja sama dengan baik), *Communication* (berkomunikasi) dan *Creativity* (kreativitas). Keempat kompetensi tersebut harus masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah sehari-hari. Inovasi dan kreativitas bisa menjadi kekuatan Indonesia yang memiliki bonus demografi. Sehingga generasi bangsa akan bisa bersaing dengan negara lain pada abad 21.

Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus mendapat perhatian yang utama dan utama. Kualitas atau mutu pendidik harus senantiasa ditingkatkan. Selain itu, kesejahteraan dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius.<sup>8</sup> Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup pendidik. Dalam uraian di atas, penulis menjelaskan kriteria seorang pendidik yang dapat dikatakan profesional dan kompeten.<sup>9</sup> Di samping itu dijelaskan juga hal-hal yang terkait dengan program peningkatan mutu pendidik, baik yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, maupun yang saat ini dilakukan oleh pemerintah seperti sertifikasi guru dan dosen,<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Malik, O. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016. 56

<sup>7</sup> Mulyasa. E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.34

<sup>8</sup> Syafauddin. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo. 2002.19

<sup>9</sup> Mulyasa. E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.21

<sup>10</sup> Hanson, J. W. dan C. S. B. *Education and the Development of Nations*. New York: Holt: Rinehart and Winston. 2000. 27

## Faktor Penyebab Rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia

Peningkatan memiliki kata dasar tingkat ditambah dengan imbuhan pe-an. Sehingga berubah menjadi peningkatan yang berupa kata benda dengan arti proses, cara, perbuatan meningkatkan sesuatu untuk kemajuan. Mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya) atau bisa di sebut dengan kualitas. Jadi, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berahlak disegala bidang untuk keberhasilan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah:<sup>11</sup>

- (a) Rendahnya kualitas sarana fisik: Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.<sup>12</sup>
- (b) Rendahnya kualitas guru: Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan<sup>13</sup>. Guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
- (c) Rendahnya kesejahteraan guru: Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.
- (d) Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan: Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
- (e) Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan.
- (f) Mahalnya biaya pendidikan: Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku

<sup>11</sup> Hamalik. *Peningkatan Kualitas Pendidikan. Indonesia Policy Briels- Ide-Ide Program 100 Hari*, 01(03), 9.

Retrieved from: <https://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/education>. 2003.39

<sup>12</sup> Muhammad Fadhli. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Studi Manajemen Pendidikan*, 01(02), 216–240. Retrieved from [file:///C:/Users/Hp/Downloads/Manajemen\\_Peningkatan\\_Mutu Pendidikan](file:///C:/Users/Hp/Downloads/Manajemen_Peningkatan_Mutu_Pendidikan). 2017. 37

<sup>13</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5364/pp-no-32-tahun-2013> diakses 7 Maret 2024.

- pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
- (g) Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis

### Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pemerintah meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah, sebagai berikut: (a) Perubahan kurikulum belajar: Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Perubahan kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan namun dengan perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi semua orang. Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan matang agar peserta didik dan pendidik bisa melaksanakannya dengan baik; (b) Peningkatan mutu guru: Peningkatan mutu guru bisa dilakukan dengan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah,<sup>14</sup> Dengan adanya seleksi yang tepat ini diharapkan guru benar-benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Dan Insan Pendidikan patut mendapatkan penghargaan karena itu berikanlah penghargaan, “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengatakan, penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia, karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi.<sup>15</sup> Staf (guru) akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik (gaji, tunjangan, bonus dan komisi) maupun penghargaan intrinsik (pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir). Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki lima tingkatan (*hierarchy of needs*) dengan Tuhanya seperti dalam ajaran islam misalnya<sup>16</sup> Yakni, mulai dari kebutuhan fisiologis (pangan, sandang dan papan), kebutuhan rasa aman (terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat), kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat; (c) Pendidik dan pengajar sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat; (d) Bantuan Operasional Sekolah. Pada intinya bantuan ini dirancang pemerintah untuk membantu sekolah yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. Namun kadang program ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyampaiannya masih belum optimal; (e) Bantuan Khusus Murid (BKM): Program pemerintah ini khusus untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya; (f) Sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak: Bila mutu pendidikan di negara kita ingin maju maka sarana dan prasarana dari pendidikan tersebut harus ditingkatkan lebih baik lagi. Bila sarana pendidikan bagus dan modern maka siswa bisa melaksanakan pendidikan dengan nyaman.<sup>17</sup>

### Standar Mutu Pendidik atau Guru Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

<sup>14</sup> Syaafuddin. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo. 2002. 34

<sup>15</sup> Malik, O. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016. 29

<sup>16</sup> Daulay, Haidar, P. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kencana. 2007. 36

<sup>17</sup> Malik, O. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016. 56

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya standar Mutu Pendidikan di bagi menjadi seperti dijelaskan di bawah ini:

a) Standar kualifikasi

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu, dilakukan kegiatan penyediaan guru pendidikan untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal.<sup>18</sup>

b) Standar kompetensi

Istilah kompetensi guru mempunyai makna, *Broke and Stone* mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan,<sup>19</sup> menyebutkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>20</sup>

Lebih lanjut dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa “kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) Pemahaman terhadap peserta didik; (c) Pengembangan kurikulum/silabus; (d) Perencanaan pembelajaran; (d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) Evaluasi hasil belajar; (h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya,<sup>21</sup>

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.<sup>22</sup> kemampuan pribadi ini meliputi hal-hal berikut: (a) Mengembangkan kepribadian yang meliputi; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

<sup>18</sup> Akhwan, M. Peningkatan dan Standarisasi Mutu Pendidikan; Tinjauan atas UU, Kurikulum dan Kemampuan Guru. *JPI FLAI Jurusan Tarbiyah*, VIII(VI), 36–45. Retrieved from <http://jurnal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/5201>. 2003. 29

<sup>19</sup> Ibid, 39

<sup>20</sup> Amrullah Aziz. Peningkatan Mutu Pendidikan. Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, p. 2015. 157

<sup>21</sup> Muhammad Fadhi. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Studi Manajemen Pendidikan, 01(02), 216–240. Retrieved from file:///C:/Users/Hp/Downloads/Manajemen\_Peningkatan\_Mutu\_Pendidikan.2017

<sup>22</sup> Syafuldin. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo. 2002.35

Esa; berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang berjiwa Pancasila; mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru kemampuan pribadi ini meliputi hal-hal berikut: (a) Mengembangkan kepribadian yang meliputi; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang berjiwa Pancasila; mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru. (b) Berinteraksi dan berkomunikasi, c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, d) Melaksanakan administrasi sekolah, (e) Melaksanakan penelitian sederhana, yang meliputi; mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, menjelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Burhanudin Salam dalam Haidar Putra Daulay menyatakan profesionalis adalah pekerjaan yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian. Cirinya, sebagai berikut: (a) Memiliki keahlian di bidang tertentu; (b) Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut; (c) Hidup dari pekerjaan tersebut; (d) Bukan sebagai hobi. Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus.<sup>24</sup>

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar secara lisan, tulisan dan isyarat. Arikunto mengemukakan kompetensi social mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Guru dalam pandangan Al-Gazali mengemban dua misi sekaligus. Yaitu tugas keagamaan, ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan dan membawa hati itu menuju Allah. Tugas lainnya adalah tugas sosiopolitik (kekhalifahan), dimana guru membangun, membangun, memimpin dan menjadi teladan yang menegakkan keteraturan, kerukunan, menjamin kelangsungan masyarakat, yang keduanya berujung pada pencapaian kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Setidaknya ada tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat.

---

23 Ibid Saifulloh et al., 2012:45

24 Sabar Budi Raharjo. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 16(2), 298–319. Retrieved from <http://perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/1129-4239-1-PB>. 32

25 Ibid hamalik.2003. 21

Ketujuh kompetensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) Memiliki pengetahuan, tentang adat istiadat baik sosial maupun agama; (b) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi; (c) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi; (d) Memiliki pengetahuan tentang estetika; (e) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial; (f) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan; (g) Setia terhadap harkat dan martabat manusia. Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum dan perlu dikema terutama guru pendidikan agama Islam, dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertaqwa, serta sebagai warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>26</sup>

### **Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan, menurut Mulyasa. E,(2007), menyebutkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berhasil melalui strategi-strategi berikut ini:

- (a) Evaluasi diri (*self assessment*): Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin, atau merencanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Kegiatan evaluasi diri ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. Kegiatan evaluasi diri ini juga merupakan refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran atau keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality, serta merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah atau madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu;
- (b) Perumusan Visi, Misi, dan tujuan: Bagi pihak sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal atau pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/penyelenggara pendidikan.
- (c) Perencanaan: Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan/disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis:
- (d) Pelaksanaan: Apabila bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/ penggerakkan atau pimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih kecil atau mikro, baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan,

<sup>26</sup>Syafauddin. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo. 2002. 23



semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.<sup>27</sup>

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.

Peran masing-masing itulah yang juga perlu disoroti didalam implementasi strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melihat peran tersebut, dapat dilihat sebagai berikut: (1) Peran kepala sekolah atau Madrasah: Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah atau Madrasah bertanggungjawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Kepala sekolah merupakan penentu masa depan sekolah. Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja di sekolah atau madrasah, pembuatan rencana, peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang; (2) Peran Guru dan Staf Sekolah: Peran guru (staf pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Artinya di samping tugas-tugas mendidik guru juga memiliki tugas-tugas yang bersifat manajemen; (3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat: Kedua peran tersebut. (4) Pemerintah: Peran Pemerintah untuk tujuan dalam jangka panjang, yaitu dengan mengupayakan kebijakan yang memperkuat sumber daya tenaga kependidikan melalui cara dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian; (5) Evaluasi: Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. (6) Pelaporan: Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan *stake holders*, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama:* sarana dan prasaran serta pendidik sebagai salah satu komponen strategi kebijakan pemerintah Indonesia yang terpenting dalam sistem pendidikan nasional yang mendapat perhatian utama. *Kedua:* Kualitas mutu pelayanan menyangkut sarana dan prasarana serta pendidik harus terus ditingkatkan. *Ketiga:* kesejahteraan pendidik dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius. Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka. Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan sebagai berikut: (a) Kualitas mencakup usaha

<sup>27</sup> *Ibid* Muhaimin dan Mudjib, 1993:34

<sup>28</sup> *Ibid* Muhammad Fadhlil, 2017:67

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; (b) Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan; (c) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang). Untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam pemerintah sudah mengaturnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI disebutkan bahwa Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhwan, M. (2003). Peningkatan dan Standarisasi Mutu Pendidikan; Tinjauan atas UU, Kurikulum dan Kemampuan Guru. *JPI FLAI Jurusan Tarbiyah, VIII(VI)*, 36–45. Retrieved from <http://jurnal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/5201>
- Amrullah Aziz. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, p. 157.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmani, Ma'mur. (2009). *Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Professional*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell. J. W. (2012). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Research Design, 04(01)*, 26.
- Daulay, Haidar, P. (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Hamalik. (2003). Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Indonesia Policy Briels- Ide-Ide Program 100 Hari, 01(03)*, 9. Retrieved from <https://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/education.pdf>
- Hanson, J. W. dan C. S. B. (2000). *Education and the Development of Nations*. New York: Holt: Rinehart and Winston.
- Harris Y. P. Sibuea. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Info Singkat Hukum. Info Singkat Hukum*, p. 388.
- Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang RI Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2005). Surabaya.
- Malik, O. (2016). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin dan Mudjib, A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Tarsito.
- Muhammad Fadhli. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Studi Manajemen Pendidikan, 01(02)*, 216–240. Retrieved from [file:///C:/Users/Hp/Downloads/Manajemen\\_Peningkatan\\_Mutu\\_Pendidikan.pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/Manajemen_Peningkatan_Mutu_Pendidikan.pdf)
- Mukhid, A. (2007). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran Yang Tepat. *Journal Tadris, 02(01)*, 119–133. Retrieved from <file:///C:/Users/Hp/Downloads/211-288->

1-SM.pdf

- Mulyasa. E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Philip B. Crosby. (2007). *Quality is Free, Mc-Graw Hill Book, New York. Qomar, Mujamil*. New York: Qomar, Mujamil.
- Sabar Budi Raharjo. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 298–319. Retrieved from <http://perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/1129-4239-1-PB.pdf>
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Suryana, S. (2009). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(02), 553. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1131/2821>  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1131/2821>
- Suwarto. (2009). Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Di Propinsi Banten Melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 492–510. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S95054>
- Syafauddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Tjiptono, Fandy, A. D. (1998). *Total Quality Management (TQM)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, A. S. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Ilmiah Didaktika*, 15(1), 13–31. Retrieved from <file:///C:/Users/Hp/Downloads/211-288-1-SM.pdf>
- Usman, M. U. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.